

Grand Desain Kebijakan Pengembangan Parawisata Lokal: Studi Terhadap Pengembangan Parawisata di Bangka Selatan

Marfina Trivinita^{1*}, dan Sarpin Sarpin¹

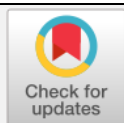
¹ Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, 33126, Bangka-Indonesia

*Korespondensi: finam327@gmail.com

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 Maret 2023



Artikel dengan akses terbuka.

Hak Cipta© 2023 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: *Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)*

Cantuman Sitasi:

Trivinita, M., & Sarpin, S. (2023). Grand Desain Kebijakan Pengembangan Parawisata Lokal: Studi Terhadap Pengembangan Parawisata di Bangka Selatan. *Journal of Politics and Democracy*, 2(2), 55-68. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v2i2.16>

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul "Grand Design Kebijakan Pengembangan Pariwisata Lokal : Dari Visi ke Implementasi (Studi terhadap pengembangan pariwisata di Bangka Selatan)" ini berfokus kepada pengembangan pariwisata di kabupaten Bangka Selatan, termasuk berbagai kebijakan yang dikeluarkan serta evaluasi dari proses implementasi dalam kebijakan yang diambil. Metode penelitian dalam penulisan ini yakni penelitian kualitatif deskriptif. Adapun hasil penelitian bahwa desain kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022 yang berupa sembilan program kebijakan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pengembangan pariwisata Bangka Selatan yang telah dijalankan selama 10 tahun ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dengan menggunakan teori kriteria evaluasi menurut William N. Dunn yang meliputi efektifitas kebijakan, efisiensi dalam pelaksanaan, kecukupan terhadap kebutuhan, pemerataan dalam pelaksanaan kebijakan, responsivitas, dan ketepatan program menunjukkan bahwa Sembilan program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan belum mencapai hasil yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang diharapkan

The research entitled "Grand Design of Local Tourism Development Policy: From Vision to Implementation (Study of tourism development in South Bangka)" focuses on tourism development in South Bangka district, including various policies issued as well as evaluation of the

implementation process in the policies taken. The research method in this writing is descriptive qualitative research. The results of the research show that the regional tourism development policy design stipulated by the South Bangka Regency Government is contained in the South Bangka Regency Tourism Development Master Plan for 2012 – 2022 in the form of nine policy programs. In practice, the South Bangka tourism development policy which has been implemented for 10 years has not run optimally. This is evident from the evaluation of policy implementation carried out using the theory of evaluation criteria according to William N. Dunn which includes policy effectiveness, efficiency in implementation, adequacy of needs, alignment in policy implementation, responsiveness, and program accuracy. It shows that the nine programs run by the government of South Bangka Regency has not achieved results in accordance with the expected indicators of success.

Kata Kunci: Evaluasi; Grand Design; Policy; Tourism

1. Pendahuluan

Sektor pariwisata merupakan sektor yang berperan besar dalam peningkatan perekonomian khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas suatu negara serta menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di Indonesia (Monica, 2016). Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015– 2019 dan dilanjutkan dalam RPJMN 2020-2024, pariwisata menjadi prioritas Nasional. Pada RPJMN tersebut, ditargetkan kunjungan jumlah wisatawan asing dapat mencapai 20 juta orang, sedangkan wisatawan dalam negeri mencapai 275 juta orang (Harefa, 2020). Pada tahun 2020 sektor pariwisata berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,1 persen yang kemudian dalam waktu 5 – 10 tahun mendatang ditargetkan mencapai angka 8 sampai dengan 10 persen. Dalam rangka mencapai target ini, pemerintah Indonesia berfokus pada perbaikan infrastruktur Indonesia termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, kesehatan dan kebersihan, serta meningkatkan kampanye promosi di luar negeri dan di dalam negeri. (Baskoro, 2018; Pendong, dkk, 2020).

Adanya otonomi daerah yang memberikan hak serta kebebasan bagi setiap daerah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat melalui pengoptimalisasi potensi yang ada di daerahnya masing-masing, termasuk dalam hal pengelolaan serta pengembangan pariwisata. Dalam hal pengembangan pariwisata, Pemerintah daerah memiliki peran untuk menyediakan dan mengatur berbagai infrastruktur yang tidak hanya dalam bentuk fisik yang berkaitan dengan kebutuhan pariwisata, memperluas berbagai bentuk fasilitas, melakukan berbagai koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat, serta melakukan promosi ke daerah lain maupun ke luar negeri (Pendong, dkk, 2020; Saidah, 2017).

Dalam upaya menyongsong era post-extractivism, Kabupaten Bangka Selatan yang memiliki garis pantai yang panjang serta potensi pariwisata yang cukup potensial sebagai alternatif pengganti pertambangan ini kemudian dikelola serta dikembangkan oleh pemerintah daerah secara visioner. Keseriusan pemerintah daerah dalam melakukan pengembangan pariwisata

terbukti dari adanya kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Bangka Selatan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016-2025, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2016-2021, Kebijakan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bangka Selatan telah tercantum dalam kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2011-2031. (Megawandi, 2020)

Sektor pariwisata digadang-gadang memiliki peluang yang sangat besar sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Hal ini terbukti dari capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Kabupaten Bangka Selatan, yang mana pada 2019 lalu sektor ini berhasil menyumbang sebesar 10% dengan presentase kenaikan sebesar 2,3% serta dari sisi pertumbuhan, sektor ini 4 berhasil tumbuh 8% dengan capaian rata-rata 10,3% per tahun. Adanya tren pergeseran kontribusi sektor terhadap perekonomian daerah dari pertambangan ke sektor industri pariwisata menjadi pendorong pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan guna mengembangkan serta mengoptimalkan sektor pariwisata ini (Monica, 2016).

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam beberapa kesempatan meyakini sebagai daerah yang menganut sistem ekonomi kreatif walaupun pada kenyataannya masyarakat Bangka Selatan masih bergantung kepada ekonomi ekstraktif. Hal ini terbukti dari inkonsistensi pemerintah yang dalam 6 melakukan pengembangan destinasi wisata masih saja diiringi dengan adanya izin usaha pertambangan di lokasi yang berdekatan. Transformasi era pertambangan menuju tren perekonomian yang berbasis pariwisata tentu memerlukan langkah yang serius dan berkelanjutan mengingat pariwisata merupakan salah satu lokomotif potensial dalam rangka menggerakkan berbagai potensi sumberdaya manusia dan juga sumber daya alam yang bermanfaat bagi warga dan lingkungannya secara partisipatif dan berkelanjutan (Darwance dan Rendy, 2018).

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan memiliki kewajiban untuk merumuskan desain kebijakan yang berfokus kepada optimalisasi potensi yang ada di Bangka Selatan, hal ini sebagaimana tercantum dalam visi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bangka Selatan Tahun 2016-2021 yang salah satunya berbunyi mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, termasuk potensi pariwisata serta, sebagaimana tujuan yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022. Pemerintah Bangka Selatan dalam merumuskan kebijakan diharuskan untuk memprioritaskan serta berfokus kepada pengembangan pariwisata. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya cita-cita guna mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat yang berasal dari potensi pariwisata Bangka Selatan sebagai potensi lokal.

Berlandaskan RPJMD (Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Bangka Selatan Tahun 2016-2021 yang berakhir tepat pada Oktober 2021 dan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022, peneliti bermaksud untuk meneliti dan menelaah terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya mencapai visi yang menjadi arah tujuan dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu melakukan pengembangan pariwisata di Bangka Selatan. Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan desain kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah Bangka Selatan dalam melakukan pengembangan pariwisata serta untuk mengevaluasi proses implementasi dari

kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Bangka Selatan, termasuk berbagai tantangan yang ada, peluang yang muncul dari proses implementasi ini serta peran dari stakeholders yang turut partisipasi dalam upaya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan di Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lokasi penelitian ini dipilih secara sengaja (purposive) dengan alasan bahwa kabupaten Bangka Selatan merupakan Kabupaten yang memiliki potensi pariwisata yang sangat besar dan dapat dioptimalkan (Miles dan Huberman, 2011). Pada penelitian ini, penggunaan desain penelitian kualitatif deskriptif dinilai relevan untuk melakukan kajian yang berkaitan dengan upaya pengembangan pariwisata lokal di Bangka Selatan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik, Pendekatan kualitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah serta dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Tohirin, 2012; Sugiyono, 2018; Moleong, 2011).

3. Hasil dan Pembahasan

a. Grand Design Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Bangka Selatan

Desain kebijakan diartikan sebagai suatu konsep dari agenda yang akan dilakukan yang merupakan sebuah konsep dari proses penyusunan kebijakan publik dengan proses-proses lain yang telah dilakukan. Dalam pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan tentu memiliki desain kebijakan dalam menentukan dan melakukan tujuan yang akan dicapai. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Riza Herdavid, Bupati Bangka Selatan memaparkan:

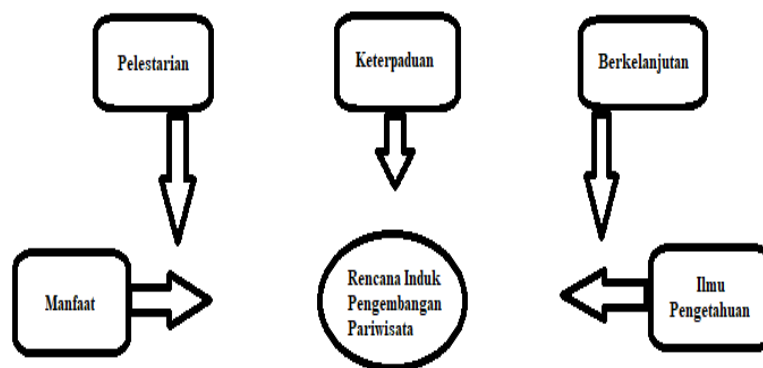
“Jika kita berbicara mengenai kebijakan tentang pariwisata tentu jelas merujuk kepada RIPPARKAB Basel ya, yang mana kebijakan ini diterbitkan dan ditandatangani oleh Pak Jamro dan berakhir tepat pada tahun ini. Di dalam RIPPARKAB ini sendiri sudah termuat berbagai rencana mengenai pengembangan pariwisata di Bangka Selatan termasuk juga tujuan yang hendak dicapai di dalamnya” (Wawancara 30 April 2022).

Pemaparan Bupati Bangka Selatan ini menjelaskan bahwa Kabupaten Bangka Selatan mengatur kebijakan pembangunan kepariwisataan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (Ripparkab) Bangka Selatan tahun 2012 – 2022. Yang mana tujuan dari pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan ini ialah:

- a. Mewujudkan industri kepariwisataan
- b. Meningkatkan kualitas destinasi pariwisata
- c. Meningkatkan upaya pemasaran
- d. Meningkatkan kapasitas organisasi kepariwisataan Kabupaten Bangka Selatan

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan disusun Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan yang terdiri dari beberapa indikator yang kemudian dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan ini disusun sebagai

bagian integral dari pengembangan pariwisata nasional dan pariwisata daerah yang disusun berlandaskan lima azas, dapat dilihat dalam gambar di bawah ini :



Gambar 1 Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan

Berdasarkan gambar di atas dan temuan-temuan peneliti di lapangan, analisis kelima azas penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan ialah sebagai berikut:

1. Manfaat
2. Pelestarian
3. Keterpaduan
4. Berkelanjutan
5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Berdasarkan lima azas dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata di atas, terbentuk grand design kebijakan pengembangan pariwisata di Bangka Selatan yang termuat dalam 9 kebijakan yang berhasil diformulasikan oleh pemerintah kabupaten Bangka Selatan yang meliputi:

Table 1 Grand Design Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Bangka Selatan

No.	Kebijakan	Indikator
1.	Pengembangan Kewilayahan Pariwisata	<ol style="list-style-type: none">a. membagi KPP Kabupaten Bangka Selatan dalam 3 (tiga) KPP, yaitu KPP A untuk pengembangan kawasan Bahari Karang Baginda dan Pulau-pulau kecil sekitarnya, KPP B untuk pengembangan kawasan Toboali dan sekitarnya, dan KPP C untuk pengembangan kawasan Simpang Rimba dan sekitarnyab. masing-masing KPP memiliki pusat pertumbuhan dan pelayanan yaitu masingmasing Desa/Kelurahan yang dianggap dapat menjadi pusat yang melayani kebutuhan pengembangan wisata dan wisatawanc. peningkatan pelayanan infrastruktur dan fasilitas pendukung kepariwisataan tiap KPP.
2.	Peningkatan Akseibilitas dan Transportasi	<ol style="list-style-type: none">a. meningkatkan kualitas prasarana darat dan laut

		<ul style="list-style-type: none"> b. meningkatkan kualitas sarana transportasi darat dan laut secara terpadu c. meningkatkan kerjasama dengan stakeholder yang bergerak dalam bidang transportasi d. meningkatkan pengelolaan dan informasi transportasi
3.	Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kualitas restoran/rumah makan dan pelayanannya serta keragaman jenis restoran b. meningkatkan kualitas akomodasi, pelayanan, dan keragaman jenisnya c. mengembangkan wadah/fasilitas informasi kepariwisataan di titik strategis
4.	Pengembangan Produk Wisata yang Terdiversifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah dan budaya Kabupaten Bangka Selatan yang memperhatikan KPP yang telah ditentukan b. mengembangkan kegiatan wisata bahari yang c. mempunyai ciri khas tersendiri antar kawasan (one village one product) d. mengembangkan kegiatan wisata industri sebagai bagian dari penguatan citra Kabupaten Bangka Selatan e. mengembangkan paket dan jalur wisata yang menekankan aspek interpretasi
5.	Peningkatan Kapasitas dan Peran Masyarakat Dalam Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata b. menguatkan kelembagaan masyarakat c. meningkatkan kapasitas dan kemampuan d. layanan usaha masyarakat di bidang pariwisata.
6.	Usaha Ekonomi Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat b. meningkatkan dukungan permodalan bagi masyarakat
7.	Penguatan Kesadaran Masyarakat Wisata Masyarakat Dalam Pembangunan Destinasi	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pariwisata agar menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat b. meningkatkan motivasi masyarakat setempat
8.	Pengelolaan Pengunjung	<ul style="list-style-type: none"> a. pengembangan dan peningkatan dalam kawasan wisata untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan kenyamanan wisatawan b. pendistribusian kunjungan wisatawan ke wilayah/daya tarik wisata lainnya/non prioritas.

9.	Pengembangan investasi kepariwisataan yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya	a. pengembangan sistem insentif dan disinsentif pada usaha pariwisata b. peningkatan kualitas pelayanan investasi dengan penyederhanaan prosedur investasi pariwisata c. peningkatan promosi peluang investasi kepariwisataan.
----	---	--

Sumber: RIPPARKAB Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022

b. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Pariwisata dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022

Berdasarkan sembilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangka Selatan serta temuan-temuan penelitian di lapangan, analisis evaluasi Sembilan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1) Kebijakan Pengembangan Kewilayahan Pariwisata

Kebijakan pertama yang disusun oleh pemerintah Bangka Selatan dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan kepariwisataan adalah kebijakan pembangunan kewilayahan pariwisata, yaitu pengembangan kawasan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan yang dirumuskan ke dalam Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP). Pembagian KPP di wilayah Kabupaten Bangka Selatan dibagi menjadi tiga wilayah KPP, yaitu:

- a. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) A untuk pengembangan Wilayah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang mencakup: Benteng Penutuk – Pantai Tanjung Bugis – Ritual Buang Jong – Pantai Lampu Tanjung Labu – Pantai Celagen – Pantai Batu Tambun – Terumbu Karang Baginda – Pulau Tinggi dan Pulau-pulau kecil sekitarnya.
- b. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) B untuk pengembangan wilayah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang mencakup: Air Panas Nyelanding – Bukit Gebang – Ritual Hikok Helawang – Ritual Kawin Massal – Perkebunan Lada – Rambut Batin Tikal – Perkebunan Sejarah Pergam – Little Amazon Jeriji – Perkebunan Nanas – Perkebunan Jeruk – Pantai Tanjung Labun – Pantai Batu Ampar – Benda Sejarah Pergam – Pantai Batu Perahu – Pantai Batu Kodok – Pantai Kelisut – Batu Belimbing – Benteng Toboali – Ritual Rebut – Pantai Payak Ubi – Makam Syekh Badaruddin – Pantai Tanjung Kelayang – Pantai Gunung Namak – Bukit Muntai – Pantai Tanjung Kerasak – Pantai Tanjung Kemirai.
- c. Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP) C untuk pengembangan wilayah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) yang meliputi: Prasasti Jatisari – Makam Karang Panjang – Air Panas Permis – Pantai Batu Bedaun – Pura Bali – Bukit Nenek – Pantai Taman Sebagian – Mercusuar Pulau Besar – Makam Krio Panting – Pelabuhan Salak Pondoh – Pantai Batu Betumpang.

Bangka Selatan pada tahun ini memiliki kesempatan yang besar untuk mengoptimalkan potensi pariwisata daerah yang ada karena telah terpilih sebagai *Key Tourism Area* prioritas kedua setelah Belitung. Keterpilihan ini berdasarkan adanya *Master Plan* Pengembangan Daya Tarik Wisata yang disusun untuk satu lokasi daya tarik wisata yang menjadi prioritas pembangunan kepariwisataan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang tertuang dalam dokumen *Integrated Tourism Master Plan* Kepulauan Bangka Belitung. Keterpilihan Bangka Belitung menjadi salah satu kawasan yang akan disusun *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP) yang tertuang dalam

Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010 – 2025, yang mana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masuk ke dalam destinasi pariwisata nasional Palembang-Babel.

2) Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi

Berdasarkan temuan-temuan peneliti di lapangan dapat diketahui bahwa Pemerintah Bangka Selatan belum berhasil untuk melakukan implementasi dan menjalankan kebijakan ini secara optimal, hal ini terbukti dari kondisi jalan di Kabupaten Bangka Selatan yang dibawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum memiliki total jalan sepanjang 633,97 km mengalami kerusakan mencapai lebih dari 100 km. Kondisi jalan di Kabupaten Bangka Selatan ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Table 2 Kondisi Jalan di Kabupaten Bangka Selatan

Kondisi Jalan	2019	2020	2021
Baik	353,18	363,498	401,058
Sedang	53,14	45,579	84,537
Rusak	23,10	4,329	46,404
Rusak Parah	204,55	220,564	101,971
Jumlah	633,97	633,97	633,97

Sumber; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

3) Kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang wisata dan fasilitas umum

Kebijakan ketiga dalam rangka mencapai tujuan kepariwisataan daerah adalah peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang wisata dan fasilitas umum. Dalam hal ini yang termasuk dalam fasilitas penunjang adalah penyediaan kualitas rumah makan/restoran serta hotel/penginapan. Mengutip dari data BPS tahun 2022 diketahui bahwa telah tersedia fasilitas rumah makan/restoran di Kabupaten Bangka Selatan dengan Total 72 restoran, dengan sebaran sebagai berikut:

Table 3 Fasilitas Rumah Makan/Restoran di Kabupaten Bangka Selatan

Kecamatan	2018	2019	2020	2021
Payung	7	7	7	7
Pulau Besar	-	-	-	-
Simpang Rimba	4	4	4	4
Toboali	32	32	32	32
Tukak Sadai	12	12	12	12
Air Gegas	10	10	10	10
Lepar Pongok	7	7	7	7
Kep. Pongok	-	-	-	-
Bangka Selatan	72	72	72	72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

Selain itu rumah makan di atas yang menjadi fasilitas pendukung lainnya yaitu, kuantitas dan kualitas hotel/penginapan di Kabupaten Bangka Selatan dapat dilihat menurut kelas akomodasinya dalam tabel di bawah ini:

Table 4 Kuantitas dan Kualitas Hotel/Penginapan di Kabupaten Bangka Selatan berdasarkan atas Kelas Akomodasi

Kelas Akomodasi	2018	2019	2020	2021
Bintang 1	-	-	-	-
Bintang 2	-	-	-	-
Bintang 3	-	-	-	-
Bintang 4	-	-	-	-
Bintang 5	-	-	-	-
Melati 1 (Kamar < 10)	1	1	1	1
Melati 2 (Kamar 10-24)	3	4	4	3
Melati 3 (Kamar > 25)	1	1	1	2
Bangka Selatan	5	6	6	6

Sumber. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022

Berdasarkan dua tabel di atas dapat diketahui bahwa kuantitas dari fasilitas pendukung pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan ini masih sangat sedikit dan tidak dapat menjadi pendukung pariwisata secara optimal, mengingat jumlah wilayah Daya Tarik Wisata (DTW) di Bangka Selatan yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.

- 4) Kebijakan pengembangan diversifikasi produk wisata yang mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi Kawasan

Kebijakan keempat yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah kebijakan pengembangan diversifikasi produk wisata yang mempertimbangkan diferensiasi, kekhasan, dan optimalisasi fungsi Kawasan yang mana strategi yang dilakukan dalam implementasi kebijakan ini adalah melakukan pengembangan kegiatan wisata bahari, wisata alam, wisata sejarah, dan budaya Kabupaten Bangka Selatan yang sesuai dengan KPP yang telah ditentukan. Implementasi dalam kebijakan ini terwujud dari pengembangan DTW yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Misalnya, di wilayah KPP A yang berfokus kepada pengembangan pariwisata bahari dan pulau-pulau kecil maka disediakan tawaran paket wisata yang di dalamnya termasuk perlengkapan untuk snorkeling contohnya paket Wisata Pulau Kelapan yang akhir-akhir ini sedang marak diminati oleh para wisatawan. Contoh lainnya adalah pengembangan pariwisata di Pantai Batu Kapur yang berfokus kepada wisata bahari yang didukung oleh wisata kuliner.

- 5) Kebijakan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata

Kebijakan kelima yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan adalah kebijakan peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan destinasi wisata. Kebijakan ini diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melalui pelibatan pokdarwis dalam setiap agenda terkait dengan pengembangan destinasi wisata tersebut, mengingat fungsi dari pokdarwis ini sendiri sebagai penggerak sadar wisata dan sapta pesona di lingkungan wilayah destinasi wisata, serta sebagai mitra pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan dan mengembangkan sadar wisata daerah. Dalam upaya implementasi kebijakan

ini, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan kerap mengadakan pertemuan dengan Ketua POKDARWIS di Lingkungan Bangka Selatan.

6) Kebijakan peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan

Kebijakan ke-enam yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam upaya mencapai tujuan kepariwisataan adalah peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan dalam implementasinya pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan peningkatan akses pasar terhadap produk wisata/usaha ekonomi pariwisata yang dikembangkan masyarakat, hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti sosial media dan juga *blog*. Salah satu contoh peningkatan promosi dan pelayanan informasi pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah adalah dibentuknya *Tourist Information Center* (TIC) oleh Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Olahraga. TIC berperan untuk memberikan informasi terkait dengan kegiatan pariwisata dan informasi seputar budaya Bangka Selatan.

7) Kebijakan Penguatan Kesadaran Wisata

Kebijakan ketujuh yang dikeluarkan oleh pemerintah Bangka Selatan adalah penguatan kesadaran wisata. Dalam hal ini implementasi yang dilakukan adalah pelembagaan POKDARWIS di masing-masing wilayah DTW. Adanya POKDARWIS yang beranggotakan anak muuda desa setempat ini sendiri diharapkan dapat menumbuhkan semangat sadar wisata dalam masyarakat setempat. Namun, pada kenyataannya kendala terbesar yang dihadapi oleh Pemerintah dan para pelaku wisata adalah kondisi masyarakat yang tidak memiliki kesadaran akan urgensi dari pariwisata. Tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan sangat rendah dan menjadi tantangan terbesar bagi masa depan Pariwisata Bangka Selatan. Pasalnya, masyarakat Bangka Selatan belum dapat mengoptimalkan potensi pariwisata yang seharusnya dapat menjadi sektor pengganti pertambangan, dan dalam hal ini masyarakat Bangka Selatan masih terus bergantung kepada pertambangan bahkan melakukan kegiatan penambangan timah di dekat wilayah daya tarik wisata. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengembangan pariwisata daerah terlihat dari adanya kerusakan fasilitas yang ada di wilayah daya tarik wisata.

8) Kebijakan pengelolaan pengunjung sebagai upaya meminimalisir dampak potensi pariwisata massal

Kebijakan ke-delapan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berkaitan dengan pengelolaan pengunjung pariwisata, yang mana dalam hal ini dilakukan peningkatan dalam kawasan wisata untuk menjaga daya dukung kawasan, ekosistem setempat, sekaligus menciptakan kenyamanan wisatawan serta melakukan pendistribusian kunjungan ke wilayah DTW non prioritas lainnya. Namun, pada pelaksanaannya kebijakan ini belum dapat dikatakan berhasil mengingat pembangunan pariwisata yang ada di Kabupaten Bangka Selatan masih berfokus kepada DTW yang ada di pusat kota saja padahal DTW yang ada di Bangka Selatan menyebar keseluruh kecamatan tidak hanya di Toboali saja.

9) Kebijakan pengembangan investasi kepariwisataan beserta pelayanannya yang mendukung konservasi lingkungan dan budaya

Kebijakan terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012 – 2022 adalah

kebijakan pengembangan investasi kepariwisataan beserta pelayanan yang mendukung konservasi lingkungan. Dalam hal investasi kepariwisataan, Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mewujudkannya melalui kerjasama-kerjasama dengan pihak-pihak swasta. Salah satu contohnya adalah kerjasama dengan PT. Timah Tbk, yang mana dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan melakukan pemanfaatan bangunan tua milik PT. Timah Tbk untuk digunakan sebagai sarana berwisata baru. Dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Muhammad Ikbal memaparkan:

“Alhamdulillah ya, kalau terkait dukungan dari pihak-pihak stakeholders itu sangat baik. Bahkan yang mencari kita untuk kerjasama itu mereka, mereka yang menawarkan diri. Ini bisa dikatakan sebagai bentuk kesadaran lah ya. Contohnya saja baru-baru ini PT. Timah yang menawarkan Gudang Beras milik mereka untuk dipergunakan sebagai museum pariwisata dan ekonomi kreatif, jadi kan kami memang mempunyai rencana untuk membuka sebuah museum parekraf yang mana nanti disitu kami melakukan promosi-promosi pariwisata juga memamerkan produk-produk lokal dari UMKM-UMKM yang ada. Dan kebetulan memang gudang beras ini kan bangunan lama belanda, jadi memang sangat mendukunglah untuk digunakan sebagai museum” (Wawancara 30 April 2022).

Berdasarkan sembilan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dan upaya implementasi dari tiap-tiap program yang telah dijelaskan ndi atas dapat kita analisis evaluasi dari kebijakan ini, mengingat kebijakan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022 yang sudah dijalankan selama 10 tahun. Untuk menganalisis evaluasi dari kebijakan ini digunakan kriteria evaluasi menurut [William N. Dunn \(2003\)](#) yang meliputi:

1. Efektifitas Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan pengembangan parwisata di Bangka Selatan termuat dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022 ini belum dijalankan dengan efektif. Hal ini dikarenakan belum tercapainya indikator-indikator yang sebelumnya telah ditetapkan bagi masing-masing program kebijakan. Dari sembilan kebijakan yang disusun dan dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan hanya empat kebijakan saja yang dapat dikatakan mencapai indikator keberhasilan. Empat program kebijakan yang berhasil dijalankan dan sesuai dengan indikator ketercapaian ialah kebijakan pengembangan kewilayahan (KKP), kebijakan pengembangan produk wisata sesuai diferensiasi dan kehasan, kebijakan peningkatan usaha ekonomi masyarakat, dan kebijakan pengembangan investasi pariwisata. Sedangkan untuk lima kebijakan lainnya belum dijalankan secara efektif dan masih jauh dari indikator keberhasilan yang diharapkan. Kelima program kebijakan ini meliputi kebijakan peningkatan aksesibilitas dan prasarana, kebijakan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas penunjang, kebijakan peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan destinasi, dan kebijakan penguatan kesadaran wisata masyarakat, kebijakan pengelolaan pengunjung. Suatu kebijakan dapat dikatakan mencapai kriteria cukup efektif apabila berhasil mencapai presentase sebesar 80% yang dihitung dengan rumus:

Berdasarkan hal ini, kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan yang tertuang dalam RIPPARKAB Bangka Selatan Tahun 2012 – 2022 dalam pelaksanaannya ialah tidak efektif, dikarenakan pelaksanaan kebijakan ini hanya berhasil mencapai persentase sebesar 44,4% yang mana masuk ke dalam kriteria tidak efektif.

2. Efisiensi dalam pelaksanaan

Efisiensi berkaitan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, yang menjelaskan tentang hubungan antara efektivitas dan usaha. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan usaha terkecil dinamakan efisien. Dari seluruh hasil penelitian mengenai efisiensi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan melalui indikator efisiensi dalam waktu, pelaksanaan dan pembiayaan dapat dikatakan belum secara optimal mendukung kebijakan tersebut. Kebijakan pengembangan pariwisata di kabupaten Bangka Selatan belum dapat dikatakan efisien mengingat waktu pelaksanaan dari kebijakan ini yang cukup lama yaitu 10 tahun namun belum mencapai hasil yang diinginkan atau belum efektif. Sehingga tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang seharusnya dalam kurun waktu tersebut dapat dijalankan secara optimal.

3. Kecukupan terhadap kebutuhan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan belum dapat memberikan pengaruh serta manfaat yang signifikan terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan hal ini terbukti dari 5 dari 9 kebijakan yang belum berhasil mencapai target atau tujuan. Yang mana kebijakan ini diantaranya berkaitan dengan peningkatan aksesibilitas dan prasarana transportasi, serta kebijakan peningkatan fasilitas penunjang wisata. Berdasarkan dua kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa pemerintah Kabupaten Bangka Selatan dalam pelaksanaan kebijakannya belum mampu untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh pariwisata Bangka Selatan. Hal ini terbukti dari masih banyak akses jalan yang rusak untuk menuju ke DTW, tidak tersedianya angkutan dalam kota sebagai mobilisasi wisatawan yang datang berkunjung, jumlah fasilitas penunjang seperti penginapan dan rumah makan yang masih sangat sedikit dan tidak sebanding dengan jumlah DTW yang sangat banyak dan menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan.

4. Perataan dalam pelaksanaan kebijakan

Secara fakta, pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan belum mencapai perataan. Hal ini terbukti dari beberapa program kerja yang belum dijalankan secara efektif, yaitu kebijakan pengelolaan pengunjung dan kebijakan peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan destinasi wisata serta kebijakan yang berkaitan dengan aksesibilitas dan fasilitas penunjang wisata. Dari beberapa kebijakan yang belum berhasil ini dapat dilihat bahwa salah satu permasalahan terbesar yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan ialah tidak meratanya pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bangka Selatan. Pengembangan pariwisata yang tidak merata ini terbukti dari tidak meratanya distribusi pariwisata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, yang mana pembangunan-pembangunan fisik fasilitas penunjang wisata serta pembangunan di daerah DTW sendiri yang ada di Kabupaten Bangka Selatan ini masih berfokus pada Daya Tarik Wisata (DTW) prioritas saja dan masih berfokus di daerah pusat kota padahal DTW yang ada di Kabupaten Bangka Selatan ini berjumlah sangat banyak dan menyebar ke seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bangka Selatan.

5. Ketepatan program

Terkait dengan penelitian ini, ketepatan kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan diukur dengan melakukan perbandingan antara tataran ideal dengan kenyataan dari beberapa indikator, dapat dilihat bahwa pada dasarnya apa yang menjadi indikator serta yang dicita-citakan dalam kebijakan pengembangan pariwisata

Bangka Selatan yang tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan tahun 2012 - 2022 yang diimplementasikan melalui sembilan program kebijakan ini merupakan langkah yang cukup tepat untuk peningkatan sektor pariwisata daerah. Namun, ketidakberhasilan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dalam proses implementasi program-program kebijakan yang telah ditetapkan ini menjadikan kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Bangka Selatan ini hanya sebagai sebuah cita-cita belaka.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Grand Design Kebijakan Pengembangan Pariwisata Lokal: Dari Visi Ke Implementasi (Studi Terhadap Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Bangka Selatan)” yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya menggunakan analisis Kriteria Evaluasi dalam Kebijakan Publik dari William N. Dunn, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa desain kebijakan pengembangan pariwisata daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan tertuang dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2012 - 2022 yang berupa sembilan program kebijakan. Dalam pelaksanaannya kebijakan pengembangan pariwisata Bangka Selatan yang telah dijalankan selama 10 tahun ini belum berjalan secara optimal. Hal ini terbukti dari rendahnya angka efektivitas dari kebijakan ini yang hanya sebesar 44% yang mana seharusnya sebesar 80% baru dapat dikatakan optimal yang mana angka ini diperoleh berdasarkan hitungan tingkat efektifitas menurut william dunn, selain itu kurang efisiennya pelaksanaan program kebijakan mengingat waktu pelaksanaannya yang cukup lama menjadi salah satu alasan mengapa kebijakan ini dikatakan belum optimal, alasan lain ketidak berhasilan dari kebijakan ini ditunjukan dari adanya kegagalan dalam memenuhi kebutuhan disektor pariwisata, serta tidak meratanya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan dan juga kurang kompaknya respon antar pemerintah, masyarakat dan para stakeholders dalam mendukung terlaksananya kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupten Bangka Selatan.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komang Jaka Ferdian, M.Si yang telah bersedia menjadi pembimbing dalam tulisan ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

Baskoro, J. Dwi. (2018). Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata (Penelitian Deskriptif Kualitatif di Desa Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur. *Thesus*. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Yogyakarta. <http://repo.apmd.ac.id/606/>

- Darwance dan Rendy. (2018). Aktivasi dan Mobilisasi Masyarakat Sadar Wisata Berbasis Kearifan Lokal, Baharisme, & Sustainable Green Tourism. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5(2). <https://journal.ubb.ac.id/lppm/article/view/743/644>
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Kebijakan Publik. Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/ekonomi-bisnis/pengantar-analisis-kebijakan-publik>
- Megawandi, Y. (2020). Pembangunan Pariwisata di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam Pendekatan Whole of Government. *Jurnal Widyaiswara Indonesia* 1(2), 108-119. <https://ejournal.iwi.or.id/ojs/index.php/iwi/article/view/27>
- Miles, B. M., & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UP. https://www.researchgate.net/publication/331094976_ANALISIS_DATA_KUALITATIF
- Moleong, L. J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1133305>
- Monica, P. (2016). Strategi Riau Tourism Board Dalam Mempromosikan Pariwisata di Provinsi Riau. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol (2), No. (1), Hal 1-15. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4904/4786>
- Pendong, Alesandro, Frans Singkoh dan Fanley Pangemanan. 2020. Peranan Pemerintah Dalam Pengembangan PARIwisata Gunung Payung di Desa Poopo Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan. *EKSEKUTIF: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 2(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/29456>
- Saidah, A. N. (2017). *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung)*. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan. Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2568>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1543971>
- Tohirin, T. (2012). *Metode penelitian kualitatif dalam pendidikan dan bimbingan konseling*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20338227&lokasi=lokal>